

**PELAKSANAAN SITA MARITAL (*MATRIMONIAL BESLAG*) DI  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 510/Pdt.G/2020/PN Sgr)**

Oleh  
Yudis Arya Bramasta, NIM.1814101143  
Program Studi Ilmu Hukum

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan sita marital di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dan (2) Efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Pelaksanaan Sita Marital Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu diperoleh (1) penerapan Sita Marital di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1 b kurang relevan dan tidak memenuhi esensi dari Sita Marital tersebut dimana pada dasarnya Sita Marital merupakan suatu bentuk Sita yang bertujuan membekukan Harta Bersama saat proses perceraian berlangsung akan tetapi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B Penerapan Sita Marital Ini malah Termasuk ke Gugatan Harta Bersama dan tidak termasuk ke gugatan perceraian. (2) Pemaparan sebelumnya telah diketahui bahwa efektivitas PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 24 ayat 2 (dua) Huruf C kurang berjalan dengan baik karena eksistensi peraturan tersebut ada akan tetapi tidak dapat di terapkan karena adanya pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa perkara yang tertutup untuk umum (perceraian) tidak bisa di gabung dengan perkara yang terbuka untuk umum .

**Kata kunci:** Sita Marital, Harta Bersama, Perceraian

***THE IMPLEMENTATION OF MARITAL CONFISCATION  
(MATRIMONIAL BESLAG) IN THE SINGARAJA DISTRICT COURT IS  
BASIC ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 OF 1975  
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019  
CONCERNING MARRIAGE. THE DIVORCE PROCESS.  
(STUDY OF DECISION NUMBER 510/Pdt. G/2020/PN Singaraja)***

By

Yudis Arya Bramasta, NIM.1814101143

Law Department

**ABSTRACT**

The objectives of this research are (1) to find out the process of implementing marital confiscation in the Singaraja District Court Class 1B and (2) the effectiveness of Government Regulation (PP) Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage regarding the Implementation of Marital confiscation. At the Singaraja District Court Class 1B. The type of research used is an empirical juridical research with a descriptive research nature. The data used in this study are primary data and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is done by document study, observation and interviews. This research data is processed and analyzed qualitatively. As for the results of the study, it was found that (1) the application of Marital Seizure in the Singaraja District Court class 1 b was less relevant and did not meet the essence of the Marital Sita which basically Marital Sita is a form of confiscation which aims to freeze Joint Assets during the divorce process but in the Court State Singaraja Class 1 B The application of this Marital confiscation is even included in the joint property lawsuit and does not include a divorce lawsuit. (2) From the previous explanation, it was known that the effectiveness of PP Number 9 of 1975 regarding the implementation of Law Number 16 of 2019 Article 24 paragraph 2 (two) Letter C did not go well because the existence of the regulation existed but could not be applied. because of the judge's statement from the Singaraja District Court which stated that cases that were closed to the public (divorce) could not be combined with cases that were open to the public.

***Keywords:*** *Marital Confiscation, Joint Property, Divorce*